

ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Muklas Adi Putra^{1(a)}, Titi Darmi^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
^{a)}muklasadip789@gmail.com, ^{b)}titidarmi@umb.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

04-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Peran Dinas Sosial,
Menanggulangi Kemiskinan,
Bengkulu Selatan

Keywords:

The Role of Social Services,
Overcoming Poverty, South
Bengkulu

Corresponding Author:

muklasadip789@gmail.com

ABSTRAK

Peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah penting karena tanpa campur tangan pemerintah maka kemiskinan yang ada tidak akan teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data lapangan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah berusaha dengan cukup baik dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di Bengkulu Selatan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2021 angka kemiskinan yang ada sebesar 18,54%, tahun 2022 sebesar 17,86%, dan tahun 2023 sebesar 17,51%. Peran yang dimaksud adalah: Peran Fasilitator, Peran Edukasi, Peran Perwakilan, dan Peran Teknis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial selaku lembaga sosial yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan sudah terlaksana dengan cukup baik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten Bengkulu selatan setiap tahunnya. Adapun peran yang dimaksud yaitu: peran fasilitator, peran edukasi, peran representatif, peran teknis.

ABSTRACT

The role of the government in overcoming poverty is very important because without government intervention, existing poverty will not be resolved. This research aims to determine the role of the Social Service in alleviating poverty in South Bengkulu Regency. The method used in this research is a qualitative method, collecting field data using observation, interviews and documentation. Meanwhile, in data analysis, researchers used techniques proposed by Miles and Huberman (1992) who stated that activities in qualitative data analysis were carried out interactively and continued continuously until completion. The activities carried out in data analysis were: data collection, data reduction, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The informants in this research consisted of 6 employees of the South Bengkulu Regency Social Service. Based on the research results, it is known that the South Bengkulu Regency Social Service has tried quite well to overcome existing poverty. This can be seen from the poverty rate in South Bengkulu which continues to decline every year, such as in 2021 the poverty rate was 18.54%, in 2022 it was 17.86%, and in 2023 it was 17.51%. The roles in question are: Facilitator Role, Educational Role, Representative

Role, and Technical Role. From the results of this research, it can be concluded that the role of social services as a social institution that plays a role in alleviating poverty has been implemented well enough to reduce the poverty rate in South Bengkulu District every year. The roles in question are: facilitator role, educational role, representative role, technical role.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.1040>

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 sebanyak 18,54 persen, pada Tahun 2022 sebanyak 17,86 persen, dan pada tahun 2023 sebanyak 17,51% (Bengkulu, 2024). Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sangat diperlukan dalam menanggulangi angka kemiskinan yang ada, dengan adanya peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan kedepannya dapat terus mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa Tindakan atau perilaku seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Nagaring, 2021). Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya seseorang yang menjalankan peran akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan sekitarnya. Peran merupakan suatu bentuk priaku yang diharapkan dari seseorang individu yang menduduki kedudukan atau status sosial tertentu (Nuraeni dkk., 2022).

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan atau kesejahteraan sosial yaitu Dinas Sosial (Rifka dkk., 2023). Dinas Sosial merupakan salah satu pelaksana pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten serta menjalankan Sebagian tugas umum pemerintah dan tugas pembangunan dibidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Kabupaten atau kota (Yolanda dkk., 2021).

Adapun Beberapa Penelitian Terdahulu Terkait Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan antara lain yaitu.

Penelita Yang dilakukan Heryanti, (2019). yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Presfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap Tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Suriyanti, (2021), dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makasar” Hasil penelitian ini menunjukan Peran Pemerintah sebagai regulator dalam menangani fakir miskin, Dinas Sosial memberikan masyarakat bantuan belum terlaksana dengan baik karena masih melalui pendataan yang lama bukan terbaru, masyarakat menerima bantuan tidak serta merta langsung menerima bantuan tetapi ada klarifikasi khusus yang harus dipenuhi seperti wajib mengikuti semua rangkaian program sehingga nantinya bantuannya dapat berguna.

Dari beberap penelitian di atas dapat dilihat bahwasanya pada setiap daerah terdapat perbedaan tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Daerah tersebut, dari hasil penelitian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Lfe dan Frank Tesoriero, (2008). Sebagai landasan teori dan fokus penelitian. Terdapat beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu pada sebuah organisasi, indikator peran tersebut diantaranya:

Peran Fasilitator. Peran dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia serta peran yang mendorong dan mendukung kelompok masyarakat tertentu.

Peran Edukasi. Peran edukasi merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang berfokus pada pemberian masukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat.

Peran Representatif. Peran representatif ini meliputi Kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, Tindakan promosi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Peranan ini melibatkan berbagai strategi yaitu: memperoleh sumber informasi, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, menjalin hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Peran Teknis. Peran teknis lebih cenderung kepada kemampuan seseorang atau kelompok pada suatu organisasi dalam melaksanakan perannya seperti peran dalam pengumpulan data dan analisis, kemampuan penggunaan computer, serta kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau Sebagai lawannya adalah eksperimen. Adapun informan penelitian ini terdiri dari 6 orang pegawai Dinas Sosial Bengkulu Selatan. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktifitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu; Pengumpulan Data , Reduksi Data , Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Adapun program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai langkah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1. Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Jumbla Penerima	Tahun
1	PKH	7.938	2024
2	BANSOS	13.071	2024
3	PBI/BPJS	96.903	2024
4	DTKS	144.141	2024

Sumber: Dinas Sosial Bengkulu Selatan, 2024

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa ada beberapa program penanggulangan kemiskinan nasional yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai langkah dalam menanggulangi keemiskinan. Program-program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang penerapan atau penyaluranya melalui Pemerintah Daerah (Dinas Sosial). Dengan diterapkannya program-program tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada. Selain program program tersebut pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan juga menerapkan beberapa program lain seperti UMKM, Bedah Rumah, pemberian kartu Jamkesda. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berpfokus pada empat indikator peran yaitu sebagai berikut:

Peran Fasilitator

Peran fasilitator merujuk pada individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau memudahkan proses, interaksi, atau kegiatan tertentu. Fasilitator biasanya bertindak sebagai mediator atau

penghubung antara berbagai pihak atau elemen dalam suatu konteks tertentu. Peran fasilitator merupakan seseorang yang memberikan fasilitas atau memfasilitasi, yaitu membantu mengelola suatu proses kegiatan dalam suatu kelompok masyarakat (Azizah & Prathama, 2024). Fasilitator juga merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama. Fasilitator berperan mendampingi masyarakat, penerima manfaat dalam menerima program.

Dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan program Dinas Sosial melakukan pendampingan hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa dalam pelaksanaan program tidak terjadi masalah dan program terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Adapun saran dalam pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu kelompok masyarakat yang menerima program atau bantuan dari Dinas Sosial, sedangkan program yang didampingi oleh Dinas Sosial pada saat pelaksanaan atau pemberian program tersebut antara lain yaitu: PKS, BANSOS, PBI/ BPJS, DTKS.

Sedangkan dalam hal pemanfaatan dan pemberian fasilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu selatan sudah memanfaatkan dan memberikan fasilitas yang memadai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan bias berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan peran fasilitator Dinas Sosial sudah menjalankan perannya dengan cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam menanggulangi kemiskinan antara lain yaitu, melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan, dan memberikan fasilitas bagi penerima program atau bantuan dalam setiap penyaluran program atau bantuan yang di laksanakan.

Peran Edukasi

Peran edukasi merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang berfokus pada pemberian masukan dalam rangka meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat. Peran edukasi bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar dan pengembangan individu atau kelompok, membantu mereka mencapai tujuan tertentu, dan memungkinkan mereka untuk menjadi anggota yang lebih terampil, berpengetahuan, dan produktif dalam masyarakat (Sompie et al., 2022).

Berdasarkan temuan peneliti terkait peran edukasi diketahui bahwa, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menerapkan atau menjalankan program pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan usaha dikarenakan program atau kegiatan suda tidak menjadi program dari Dinas Sosial. Sedangkan dalam hal pemberian informasi mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial menyampaikan informasi-informasi tersebut melalui media sosial, media cetak, dan instansi lain untuk membantu menyampaikan informasi terkait program yang dilaksanakan Dinas Sosial kepada masyarakat.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan peran edukasi dinas sosial hanya memberikan informasi dan himbawan terkait proses dan tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada.

Peran Representatif

Peran representatif mengacu pada tanggung jawab seseorang untuk mewakili suatu kelompok, organisasi, atau entitas tertentu dalam berbagai situasi atau forum. Ini bisa mencakup berbagai konteks, mulai dari politik hingga bisnis, atau bahkan dalam hubungan antar pribadi. Peran representatif meliputi Kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, Tindakan promosi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Peranan ini melibatkan berbagai strategi yaitu: memperoleh sumber informasi, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, menjalin hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman (Meylawati & Anggraeni, 2021).

Dari hasil temuan peneliti dilapangan diketahui bahwa, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan kolaborasi Dinas Sosial sudah melakukan kolaborasi dengan berberapa instansi baik instansi pemerintah maupun swasta hal itu dilakukan guna mempermudah dalam melakukan kegiatan baik

itu kegiatan penanggulangan kemiskinan ataupun kegiatan dinas lainnya. Sedangkan dalam hal pemanfaatan media, Dinas Sosial memanfaatkan hal itu untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan dinas baik pengolahan data maupun perencanaan ataupun penerapan program Dinas Sosial serta, Dinas Sosial juga memanfaatkan media yang ada untuk menyalurkan informasi informasi terkait Dinas Sosial kepada masyarakat.

Terkait pemanfaatan media sosial dari Dinas Sosial dapat dilihat dari:

- <https://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>
- Dinassosialbs (instagram)
- Dinas Sosial “Dinsos Bengkulu Selatan” (facebook)

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dinas Sosial sudah menerapkan peran representatif ini dengan cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam menanggulangi kemiskinan. Kegiatan kegiatan tersebut antara lain yaitu: kolaborasi, pemanfaatan media.

Peran Teknis

Peran teknis merupakan kemampuan seseorang atau kelompok pada suatu organisasi dalam melaksanakan perannya seperti peran dalam pengumpulan data dan analisis, kemampuan penggunaan komputer, serta kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan. (Sompie et al., 2022) Peran teknis biasanya memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi yang digunakan, kemampuan untuk memecahkan masalah teknis, dan keahlian dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara solusi teknis. Dalam beberapa kasus, peran teknis juga melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dengan pihak non-teknis, untuk menjelaskan konsep teknis dengan cara yang mudah dimengerti. Dalam setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta peran teknis sangat penting karena tanpa adanya peran ini suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan yang akan mereka laksanakan.

Berdasarkan temuan dilapangan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan diketahui bahwa Dinas Sosial Bengkulu Selatan sudah menjalankan peran teknisnya dengan cukup baik, hal itu dapat dilihat dari cara mereka menentukan dan melaksanakan kegiatan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan serta bagaimana cara

mereka melakukan analisis data yang diperoleh. Selain itu peran teknis yang mereka terapkan juga dapat dilihat dari cara mereka melakukan penyusunan agenda dalam melaksanakan program yang mereka terapkan.

Tabel 2. Jadwal Penyaluran Bantuan

No	Program Bantuan	Jadwal Penyaluran
1	PKH	1 Kali Setiap Bulan
2	BANSOS	1 Kali Setiap Bulan
3	PBI/BPJS	1 Kali Setiap Bulan
4	DTKS	1 Kali Setiap Bulan

Sumber: Dinas Sosial Bengkulu Selatan, 2024

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menanggulangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Seperti yang di ketahui angka kemiskinan di kabupaten Bengkulu selatan terus mengalami perubahan ke arah yang positif setiap tahunnya atau terus mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan empat indikator peran yang dijadikan landasan teori maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Dari empat indikator peran yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial ini menunjukkan dampak yang positif dalam menanggulangi kemiskinan hal itu dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya seperti pada tahun 2021 angka kemiskinan di Bengkulu Selatan sebesar 18,54%, pada tahun 2022 angka kemiskinan yang ada sebesar 17,86% dan di tahun 2023 angka kemiskinan yang ada sebesar 17,51%.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

- Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas ruang lingkup penelitian seperti menambah fokus yang ingin dilihat.
- Bagi peneliti selanjutnya dapat memperliasi ruang lingkup penelitian seperti melibatkan beberapa pihak terkait dengan penanggulangan kemiskinan selain Dinas Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, P. N., & Prathama, A. (2024). *Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh)*. 7(2), 695–704.
- Bengkulu, D. kominfo dan statistik provinsi. (n.d.). *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Berdsarkan kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu*.
- Heryanti. (2019). Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan (perspektip Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial). *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 46–72.
- Meylawati, L. E., & Anggraeni, F. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dalam Mengatasi Dismenorea Primer Pada Remaja. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 6(1), 34–38. <https://doi.org/10.52822/jwk.v6i1.171>
- Nagaring, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Nuraeni S, Rachmawati Ike, & Nur Tuah. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Professional*, 9(1), 143–148.
- Rifka, E., Adam, & Samsinas. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. *Jurnal Fo Islamic Community Anf Development*, 2(2), 94–100.
- S, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>
- Sompie, M. E. P., Aminudin, A., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 93–102. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210>
- Suriyanti, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar, 76.
- Wuladari, S., Azahra, A., Sari, N., Nasution, A., Nisa', F., Komputer, J. I., & Dan Manajemen, E. (2022). Kesenjangan Pendapatan yang Memicu Kemiskinan di Indonesia. *JKEM Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, 2(1), 238–251.